Media Sosial dan Demokrasi Digital: Opini Publik atau Polarisasi Pasca Pemilu 2024?

Rangga Galura Gumelar¹, Iman Mukhroman², Ikhsan Ahmad³,

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: rangga.gumelar@untirta.ac.id

Kata kunci :

Media Sosial; Opini Publik; Demokrasi Digital; Pasca Pemilu 2024

Abstrak

Era demokrasi digital telah menjadikan media sosial sebagai alat utama dalam membentuk opini publik dan meningkatkan partisipasi politik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dua sisi peran media sosial: sebagai katalisator keterlibatan politik yang lebih luas dan sebagai faktor yang memicu polarisasi masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana digital, studi ini menemukan bahwa media sosial mempercepat arus informasi politik, memungkinkan keterlibatan pemilih yang lebih aktif, dan menciptakan ruang diskusi yang lebih inklusif. Namun, algoritma platform digital juga memperkuat fenomena echo chamber dan filter bubble, yang menyebabkan fragmentasi opini dan meningkatkan polarisasi. Fakta berbicara juga bahwa misinformasi dan hoaks menjadi tantangan dalam menjaga kualitas opini publik yang sehat. Pasca Pemilu 2024, polarisasi opini politik tetap kuat di media sosial, dimana pendukung kandidat tertentu masih mempertahankan narasi politik mereka. Oleh sebab itu, harus ada peningkatan literasi digital dan regulasi dari pihak media sosial supaya diskusi bersifat fakta dan data. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya merekomendasikan bahwa kerja sama antara pemerintah, media sosial, dan masyarakat harus lebih meningkat lagi untuk mewujudkan lingkungan digital yang lebih sehat dan mendukung demokrasi yang inklusif.

Keywords :

Social Media; Public Opinion; Digital Democracy; Post-election 2024

Abstract

The era of digital democracy has made social media a key tool in shaping public opinion and increasing political participation. This study aims to analyze two sides of social media's role: as a catalyst for broader political engagement and as a factor that triggers community polarization. Through a qualitative approach based on digital discourse analysis, this study finds that social media accelerates the flow of political information, enables more active voter engagement, and creates more inclusive discussion spaces. However, digital platform algorithms also amplify the echo chamber and filter bubble phenomena, which cause opinion fragmentation and increase polarization. It is also a fact that misinformation and hoaxes pose a challenge in maintaining the quality of healthy public opinion. Post-election 2024, the polarization of political opinion remains strong on social media, where supporters of certain candidates still maintain their political narratives. Therefore, there must be an increase in digital literacy and regulation of social media so that discussions are factual and data-driven. Based on the results of this study, I recommend that cooperation between the government, social media, and society should increase to create a healthier digital environment and support inclusive democracy.

PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi memperkenalkan cara untuk memperluas interaksi, informasi, partisipasi, dan kehidupan politik bagi warga negara dalam jumlah yang jauh lebih besar. Media sosial telah bergeser dari sekadar alat komunikasi menjadi kekuatan ketiga di dunia modern yang membangun opini publik dan menyebarkan informasi politik di era digital ini. Berkat platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, warga negara sekarang dapat berpartisipasi secara langsung dalam debat politik. Mereka bebas untuk menyampaikan berita, melaporkan isu-isu terkini, dan menunjukkan dukungan mereka kepada orang atau kebijakan tertentu. Transformasi ini menghasilkan lebih banyak akses dan opini yang disuarakan, sementara dilema baru dalam hal jaminan kualitas informasi yang disebarkan menjadi masalah yang lebih mengerikan (Bakshy et al., 2023).

Di sisi lain, peran media sosial sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Para pemilih saat ini telah beralih dari hanya mengandalkan cara-cara tradisional berskala besar untuk mendapatkan informasi politik. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengikuti

akun resmi dari beberapa kandidat atau partai dan berkomentar di jaringan dan forum serta berbicara dengan para pemimpin politik. Media sosial memiliki potensi untuk menyebarkan informasi dengan sangat cepat dan luas, menjadikannya alat yang sangat efisien untuk mempengaruhi opini publik. Namun, keterbukaan media sosial juga membuatnya rentan terhadap ancaman manipulatif berita palsu dan bias algoritmik yang dapat memengaruhi pola pikir dan orientasi politik masyarakat (Dubois & Blank, 2023).

Selain itu, hal ini juga terjadi pada masyarakat digital dalam hal fenomena ruang gema dan gelembung filter, namun cenderung memperkuat polarisasi politik. Karena apa yang disajikan oleh media sosial kepada pengguna biasanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna, orang-orang hanya akan terpengaruh oleh opini yang mendukung apa yang mereka yakini. Sehingga opini menjadi semakin terpecah, dengan masing-masing pihak hampir tidak mendengar sudut pandang yang berlawanan dari kubu politik lainnya. Efek ini akan semakin parah setelah pemilu 2024, ketika siklus pemilu telah berakhir namun perdebatan politik di media sosial masih terus berlangsung. Polarisasi semacam itu juga dapat

mempersulit rekonsiliasi, dan menurunkan kemauan untuk menerima status quo demokrasi (Benkler et al. 2023).

Selain memperparah polarisasi, media sosial juga menjadi sarana utama untuk misinformasi dan disinformasi. Dalam hitungan menit, berita palsu/informasi yang menyesatkan mengambil alih opini publik dan setiap saat menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat. Penggunaan narasi tak berdasar yang memengaruhi persepsi hasil pemilu adalah kasus utama dalam pemilu 2024. Kelompok-kelompok tertentu menggunakan media sosial untuk menantang keabsahan hasil pemilu, membuat tuduhan-tuduhan kecurangan pemilu tanpa dasar yang kuat, dan menciptakan ketidakpuasan di antara basis mereka. Berdasarkan data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO 2024), tren hoaks politik benar-benar meroket selama Pemilu 2024 dan pasca Pemilu 2024 yang menyebabkan meningkatnya tensi politik dan berujung pada ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Di antara banyak hal lainnya, media sosial telah menjadi salah satu pendorong utama demokrasi digital Indonesia pasca-2024. Ketika platform

digital semakin menjadi landasan *de-facto* untuk kampanye politik (baik oleh calon politisi maupun pemilih), ada pertanyaan besar dan penting mengenai apakah media digital akan mengarah pada peningkatan opini publik, atau apakah media digital hanya akan menjadi bahan bakar polarisasi. Secara umum, media sosial memperkuat hubungan interaksi Pemerintah-Masyarakat, memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi yang luar biasa (Dunan, 2020). Platform media sosial juga telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu (Waruwu et al., 2024). Menurut Dahlgren (2023), media sosial dapat memperkuat praktik demokrasi dengan menyediakan ruang tambahan bagi warga negara untuk mengekspresikan diri mereka dan menawarkan informasi yang lebih luas dan beragam. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian lain mengungkapkan bahwa akses yang lebih besar terhadap informasi tidak serta merta mendorong dialog yang positif. Algoritma mendorong konten yang terpapar kepada pengguna di media sosial, sehingga berpotensi merusak paparan keyakinan politik (Bakshy et al., 2023). Jadi, meskipun ruang keterlibatan yang diciptakan oleh media sosial dapat

mengarah pada persepsi peningkatan partisipasi, kualitas perdebatan dan musyawarah yang didiskusikan masih menjadi isu yang kritis. Oleh karena itu, untuk menggunakan media sosial dengan cara yang optimal dalam rangka mencapai tujuan partisipasi politik yang lebih baik dan proses pengambilan keputusan yang lebih baik di masyarakat, maka tidak dapat dihindari untuk memahami dinamika ini.

Salah satu ancaman paling serius yang kita hadapi saat ini terhadap kepercayaan yang diberikan oleh demokrasi digital dan teknokrasi, adalah kemunculan adegan yang disebut ruang gema (*Echo Chamber*) dan gelembung penyaring (*Filter Bubble*). Cass Sunstein (2024) mencatat bahwa algoritme yang digunakan oleh situs media sosial sering kali memiliki bias untuk menampilkan materi yang konsisten dengan apa yang dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Hal ini menyebabkan individu mengukuhkan bias kognitif mereka sendiri dan membatasi lingkup pengetahuan politik mereka. Dalam sebuah penelitian oleh Cinelli dkk. (2023), yang terbatas pada pandangan politik dalam hal ini, bahwa hanya membiasakan individu dengan pendapat yang selaras dengan pendapat mereka sendiri menjadi tidak efektif karena

memperkuat satu pendapat sementara gagal menciptakan ruang untuk mempertimbangkan pendapat alternatif. Jika ini adalah titik kritis, ini adalah titik kritis yang berpotensi merusak apa yang secara tradisional telah menjadi dinamika debat publik yang sehat di mana kita semua terlibat, di mana kita semakin jarang mendengarkan dan berbicara dengan pandangan yang berlawanan. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, di mana kemajemukan pendapat dan keragaman ide terancam. Namun, ini adalah masalah yang harus dipecahkan jika kita ingin mewujudkan demokrasi digital dengan mempermudah suara-suara yang lebih luas dan beragam untuk berpartisipasi dalam wacana publik.

Dalam konteks demokrasi digital, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan telah menjadi hambatan nyata dalam membentuk persepsi publik. Penelitian dari Vosoughi dkk. (2018) menemukan bahwa berita palsu menyebar lebih cepat dan lebih luas daripada berita yang benar dan jenis berita yang paling cepat menyebar adalah berita palsu yang kontroversial secara politik (Vosoughi dkk., 2018). Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh MAFINDO (2024) tentang Hoaks Politik

selama Pemilu 2024 di Indonesia menemukan bahwa jumlah hoaks politik melonjak sangat drastis dan sebagian besar klaim tersebut bertentangan dengan faktual atas tuduhan kecurangan dalam proses pemilu. Selain itu, Dubois dan Blank (2023) menyoroti bahwa kehadiran informasi palsu ini tidak hanya membentuk pilihan politik individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada berkembangnya polarisasi di masyarakat. Dengan demikian, pertanyaan tentang bagaimana masyarakat menyaring fakta dari fiksi menjadi lebih rumit, dan sangat penting bagi semua pihak untuk membantu dalam hal ini karena demokrasi kita mungkin bergantung pada hal tersebut. Hanya melalui kerja kolektif untuk meningkatkan literasi media dan memperkuat hukum yang mengatur penyebaran informasi yang salah, kita akan sampai pada lingkungan informasi yang lebih kuat dan adil.

Generasi muda saat ini mungkin merupakan kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial untuk terlibat dalam politik. Karpf (2024) menunjukkan bahwa media sosial merupakan hal yang baik karena pemilih muda dapat lebih terlibat dalam kampanye politik, membicarakan isu-isu kebijakan publik, dan mengeksekusi

serta memobilisasi berbagai gerakan sosial yang menginginkan perubahan. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa generasi pemilih muda yang pada akhirnya baru mengenal media yang meliputi lanskap politik tidak siap dalam hal mengetahui bias informasi (Putri, 2023). Ini menunjukkan pergeseran besar dari kebiasaan sebelumnya tentang bagaimana generasi muda mengonsumsi informasi politik. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi bagi warga negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mendorong partisipasi politik di kalangan anak muda. Angka golput ini sangat memprihatinkan karena generasi muda bertanggung jawab dalam membentuk arah kebijakan dan masa depan politik suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana media sosial digunakan dalam konteks politik sangat diperlukan, terutama dalam upaya mempromosikan perilaku aktif dan pengetahuan politik di kalangan generasi muda.

Selain menjadi alat komunikasi politik yang diakui secara resmi, media sosial juga berperan dalam membentuk opini publik melalui kampanye. Wardle dan Derakhshan (2023) menemukan bahwa beberapa kelompok

menggunakan media sosial untuk mempromosikan propaganda dan narasi yang mendukung kandidat atau partai politik tertentu. Buzzer memainkan peran yang cukup baik dalam skenario pemilihan umum juga. Seperti yang diamati dalam Berliana dan Fitriyah (2022), buzzer dapat memimpin percakapan politik di media sosial, bahkan beberapa di antaranya memajukan isu-isu politik yang kontroversial dengan kemampuan untuk menarik perhatian massa dan mendukung pandangan tertentu. Ramadhan (2021) menjelaskan bahwa keberadaan populasi buzzer juga dapat membawa masalah tersendiri, terutama bagi pemilih pemula yang mungkin tidak sepenuhnya memahami informasi yang disebarkan di platform tersebut.

Fenomena buzzer politik dalam konteks Indonesia telah menarik untuk diteliti. Mereka menemukan bahwa sejumlah besar akun anonim ini dibuat secara khusus untuk mendukung atau, sebaliknya, menentang kandidat tertentu selama musim pemilu 2024. Hal ini dapat mengubah (sebagai catatan, merusak) sifat wacana publik yang sehat. Tindakan-tindakan ini tidak hanya mempolarisasi publik tetapi juga dapat membahayakan fondasi demokrasi itu sendiri. Maka di sinilah peran

masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi berita-berita yang beredar di media sosial agar dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang propaganda yang mungkin disampaikan oleh buzzer politik. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus sadar akan keberadaan buzzer politik dan juga pengaruhnya, demi kualitas demokrasi dan diskusi publik yang lebih baik di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menilai peran media sosial dalam meningkatkan opini publik sekaligus menyulut polarisasi politik di tengah-tengah (pasca) Pemilu 2024. Dua fokus utama penelitian ini adalah bagaimana algoritma media sosial menciptakan ruang gema politik dan bagaimana mekanisme penyebaran informasi dapat mengubah kemampuan masyarakat untuk bereaksi setelah pemilihan umum untuk tidak hanya meredakan, tetapi juga memperburuk perpecahan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam mengurangi dampak negatif media sosial terhadap proses demokrasi digital yang sedang berlangsung. Dengan memahami dinamika yang terjadi dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana digital untuk meneliti peran media sosial dalam membentuk opini publik dan polarisasi politik setelah pemilu 2024. Penelitian deskriptif-eksploratif ini bertujuan untuk memahami penggunaan media sosial dalam wacana politik dan dampaknya terhadap keterlibatan publik dan polarisasi opini pascapemilu. Sumber data meliputi analisis konten media sosial, serta dokumen dan laporan dari MAFINDO. Dengan pendekatan yang komprehensif seperti ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh media sosial terhadap opini publik dan polarisasi politik setelah pemilu 2024.

PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa media sosial menjadi sangat berpengaruh dalam keterlibatan politik, terutama bagi para pemilih muda. Terdapat peningkatan aktivitas digital yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2024. Para kandidat politik sekarang menggunakan TikTok, Twitter, dan Instagram untuk

memperluas penemuan mereka ke audiens yang lebih luas dan lebih beragam (Norris, 2023). Tidak hanya pemilih muda dan pemilih yang berpartisipasi pada tingkat yang jauh lebih tinggi melalui kampanye digital mereka, tetapi diskusi politik juga menjadi lebih interaktif dan responsif. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi individu untuk secara aktif terlibat dalam proses politik (Karpf, 2024).

Selain itu, media sosial telah menjadi penyedia informasi utama tentang politik kepada khalayak luas. Kemampuan untuk memeriksa berbagai informasi politik dengan cepat dan gratis telah memungkinkan pemilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan lebih jelas tentang kebijakan, program kampanye, dan profil masing-masing kandidat (Dubois & Blank, 2023). Namun, sisi lain dari hal ini adalah longsor informasi yang tidak terverifikasi yang semakin banyak beredar. Oleh karena itu, individu harus memilih dengan lebih hati-hati, bersikap skeptis, dan menyaring informasi yang mereka konsumsi, jika tidak, mereka akan terjebak dalam informasi yang menipu (Vosoughi et al., 2023).

Media sosial tetap menjadi arena media sorotan sebagai arena bagi publik untuk menilai proses pemilu dan

kebijakan pemerintahan baru. Transparansi pemilu, agenda yang diusulkan para kandidat selama kampanye, dan dampak dari kebijakan yang telah diadopsi, mulai menjadi topik pembicaraan di berbagai forum digital (Tucker et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berperan sebagai alat untuk kampanye politik, tetapi juga sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan baru dengan memungkinkan pengguna media sosial untuk mengekspresikan keluhan dan pemikiran mereka.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa media sosial meningkatkan keterlibatan politik - dan hal ini bukannya tanpa risiko, karena polarisasi publik terus berkembang. Sebagai contoh, segera setelah pengumuman hasil pemilu, terjadi peningkatan besar dalam volume narasi yang mendelegitimasi, terutama di kalangan pendukung kandidat yang kalah (Benkler et al., 2023). Algoritma media sosial membawa polarisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu bagaimana gagasan dan sudut pandang tertentu diperkuat di atas yang lain, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk keseimbangan dan objektivitas (Cinelli et al., 2023).

Tema-tema yang dijadikan sebagai berita hoax pada pemilu tahun 2024 diantaranya : 1) Sara; 2) Klaim atas dukungan dari para calon atau kandidat; 3) Penolakan pada calon atau kandidat; 4) Isu kecurangan pemilu. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan pengaruh yang lebih bernuansa dari media sosial terhadap perilaku politik di dunia. Di satu sisi, media sosial bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi politik dan diskusi yang lebih dinamis. Namun, di sisi lain, media sosial juga dapat memperdalam polarisasi dan penyebaran informasi yang salah. Oleh karena itu, masyarakat harus terus bersikap skeptis dan memilih untuk menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik. Harus ada dorongan untuk menciptakan ruang diskursus yang lebih sehat dan positif di dunia maya.

Oleh karena itu, media sosial tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga menjadi pemain penting dalam membentuk suara massa dan juga ekonomi di wilayah yang dinamis secara politik. Karena dampaknya bisa sangat luas dan beragam, masyarakat diharapkan untuk menggunakan media sosial dengan hati-hati. Media sosial bermanfaat bagi politik jika mengikuti penggunaan media sosial yang

bertanggung jawab, semua jenis suara harus dapat terhubung ke ranah politik tanpa dibungkam oleh pendapat lain yang lebih vokal dan memastikan bahwa hanya ada sedikit konflik yang dapat berasal dari rincian yang salah tentang salah satu kubu atau kampanye apa pun yang menyebar dengan cepat.

Keterlibatan aktif masyarakat di media sosial dalam diskusi politik bahkan dapat menjadi alat untuk meleak politik, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk secara kolaboratif memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya diskursus di *platform* digital, di mana semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk memperkaya proses demokrasi. Begitupun dengan Keterlibatan generasi muda dalam mengatasi tantangan hoaks di media sosial juga menjadi sorotan penting. Penelitian menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab dalam menanggulangi informasi yang menyesatkan, berkat keterampilan literasi digital yang mereka miliki (Kartika & Mustika, 2023; Akbar & Fahlevvi, 2023). Tanpa adanya upaya aktif untuk menyaring informasi, potensi

polarisasi dapat meningkat. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan politik yang lebih baik dan strategi untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun dialog yang konstruktif, bukan sebagai alat untuk perpecahan (Yunas et al., 2023).

Di situlah media sosial menjadi jembatan bagi masyarakat ke dalam proses politik sebuah jembatan yang seharusnya membantu masyarakat dalam bertukar ide dan informasi untuk kepentingan politik mereka. Inisiatif literasi digital juga penting agar masyarakat dapat belajar lebih banyak tentang algoritma, cara kerjanya, dan bagaimana algoritma mempengaruhi informasi yang kita konsumsi. Diharapkan dengan demikian masyarakat akan lebih cerdas dalam menggunakan media sosial, terhindar dari informasi yang menyesatkan, dan ikut serta menghasilkan diskusi yang lebih konstruktif dan bermanfaat bagi kehidupan politik tanah air.

Dengan demikian media sosial adalah sebuah alat dan seperti halnya benda-benda lainnya, media sosial dapat digunakan untuk efek positif atau negatif. Mengatasi kesadaran kolektif dan membina lingkungan di mana ranah digital seharusnya menjadi positif harus diutamakan di atas semua peserta

proses politik. Media sosial dapat, jika diimplementasikan dengan baik, menjadi alat untuk meningkatkan demokrasi dan membantu lebih banyak orang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang membentuk kehidupan sehari-hari mereka.

Meskipun menunjukkan kapasitas media sosial untuk meningkatkan keterlibatan politik, ada hambatan yang sangat nyata untuk efektivitas yang lebih luas. Tantangan ini adalah kelompok-kelompok tertentu juga mengambil keuntungan dari platform ini untuk memperkuat polarisasi opini publik. Algoritma media sosial beroperasi dengan menyajikan konten berdasarkan kesukaan dan minat pengguna sehingga menyebabkan ruang diskursus yang seharusnya menjadi arena diskusi penuh menjadi sangat terbatas (Sunstein, 2024). Mekanisme ini menyebabkan berkurangnya interaksi antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik yang berlawanan, dan membantu semakin menguatnya polarisasi politik di dalam masyarakat kita (Cinelli et al., 2023).

Selain itu, setelah kampanye, berita palsu dan informasi yang salah juga semakin berkembang, yang juga harus ditangani dengan baik. Penelitian mencatat bahwa mayoritas hoaks yang

tersebar di media sosial terkait dengan tuduhan kecurangan pemilu dan upaya mendelegitimasi hasil resmi pemilu (MAFINDO, 2024). Apa yang dilakukan oleh Vosoughi dkk. (2017): Berita palsu menjangkau lebih banyak orang dan menyebar lebih cepat daripada berita yang benar, terutama ketika topiknya bermuatan emosional.

Lebih lanjut, banyak penelitian mengindikasikan bahwa peran buzzer dalam kampanye politik di media sosial dapat menyebabkan kerusakan terhadap demokrasi, dengan detak informasinya yang tidak seimbang dan bias (Wulandari, 2023). Ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat mendorong opini publik, ia juga memiliki kapasitas untuk menciptakan dan memperparah divisi yang ada di dalam masyarakat. Mengingat kompleksitas ini, dapat disimpulkan bahwa media sosial pasca Pemilu 2024 akan memiliki dampak yang beragam: di satu sisi, dapat memperluas ruang partisipasi publik, sedangkan di sisi lain, berpotensi meningkatkan polarisasi di kalangan pemilih.

Polarisasi politik yang dihasilkan dari media sosial memiliki dampak lanjutan seperti radikalisasi digital. Penelitian telah menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ekstremis telah

menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi yang lebih memecah belah dibandingkan dengan sebelum pemilihan umum pada tahun 2024 (Benkler et al., 2023). Beberapa kelompok bahkan menggunakan pendekatan propaganda digital yang kompleks untuk membangun narasi yang mendukung kepentingan tertentu, dan hal ini menjatuhkan situasi politik di tingkat negara (Wardle & Derakhshan, 2023).

Menghadirkan solusi yang lebih terstruktur untuk menangani perang budaya akibat postingan politik di pilar-pilar seperti media sosial harus difokuskan untuk mengurangi dampak buruk dari skenario ini. Peran pemerintah yang lebih aktif, perlu diperkenalkan, tetapi pemerintah harus bekerja sama dengan platform media sosial dan masyarakat sipil untuk membuat kebijakan yang lebih ketat terkait transparansi algoritma dan penyaringan informasi serta mendorong literasi digital masyarakat (Norris, 2023). Ini bukan satu-satunya langkah yang diambil, sehingga diharapkan setelah 2024, lingkungan digital di Indonesia akan lebih mampu mendorong perdebatan politik yang inklusif dan konstruktif. Namun, sama pentingnya untuk diingat bahwa media sosial tidak

selalu merupakan hal yang baik atau buruk dalam konteks politik. Namun, *platform* ini bukannya tanpa tantangan, bahkan jika mereka menyediakan ruang untuk keterlibatan politik yang lebih luas. Sekali lagi, ini berarti menghasilkan jenis ekosistem informasi yang ingin kita ciptakan akan menjadi sebuah proses kolaboratif. Dan hanya dengan begitu kita dapat berharap, bahwa kita dapat menurunkan tingkat polarisasi opini publik dan menyediakan ruang diskusi yang lebih baik di era digital ini.

Oleh karena itu, meskipun media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan politik, kita juga harus mempertimbangkan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh media sosial. Meskipun penting bagi kita untuk mengakui keuntungan yang dihadirkan oleh platform-platform ini, kita juga harus menyadari sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kita dapat melihat pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk percakapan yang lebih bermanfaat dan mengurangi polarisasi yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Keberhasilan menjadikan ruang digital ini sebagai tempat yang lebih baik akan sangat bergantung pada semua elemen masyarakat, termasuk

individu, organisasi, dan pemerintah yang sadar dan bertindak terhadapnya. Hal ini, dikombinasikan dengan keinginan untuk mendapatkan wacana publik yang berkualitas tinggi, membuka jalan untuk membayangkan betapa jauh lebih efektifnya media sosial sebagai alat untuk meningkatkan demokrasi dan keterlibatan politik tanpa merusak kualitas musyawarah publik.

Mempertimbangkan semua elemen ini, seharusnya sudah jelas bagi kita bahwa kita perlu bersikap sekritis mungkin terhadap cara kita menggunakan media sosial dan peran media sosial dalam politik]. Harus ada lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran publik dalam menggunakan informasi seperti verifikasi informasi dan memahami algoritma apa yang digunakan oleh platform-platform tersebut. Hal ini akan membantu membangun masyarakat yang terinformasi yang pada gilirannya akan membantu membangun lingkungan politik yang stabil dan harmonis secara permanen.

Untuk itu, Pelatihan dan kesadaran pendidikan mengenai literasi digital sangat penting. Mereka membutuhkan keterampilan untuk merefleksikan apa yang mereka lihat secara *online*, entah bagaimana membangun respon yang

bijaksana dan membuat pilihan berdasarkan hal tersebut. Seperti mengidentifikasi apakah sebuah berita itu asli atau palsu dan bagaimana media sosial dapat memanipulasi apa yang Anda lihat. Selain itu, implementasi program-program yang dapat dicapai untuk meningkatkan literasi digital, yang menargetkan demografi yang berbeda, dapat dikembangkan melalui kemitraan antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Semoga hal ini dapat membuka jalan bagi ekosistem informasi yang lebih sehat di media sosial dengan langkah-langkah yang tepat dan kolektif. Hal ini tidak hanya untuk meminimalisir polarisasi, tapi juga melibatkan semua orang dengan lebih baik dalam demokrasi.

Secara teoritis, media sosial dapat menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memungkinkan mereka untuk secara kolektif berdiskusi dan bertukar pikiran. Namun, sayangnya, media sosial dipandang oleh banyak orang sebagai arena yang membuat masyarakat terpecah belah dan membuat kita semakin jauh dari satu sama lain. Jadi, kita perlu mengubah sikap dan memanfaatkan kekuatan media sosial. Mari kita manfaatkan dengan lebih baik untuk mempromosikan politik yang lebih aktif

dan inklusif untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Secara kolektif melalui percakapan melalui platform sosial, kita membangun kesadaran yang lebih dekat akan penderitaan masyarakat. Oleh karena itu, media sosial lebih dari sekadar saluran komunikasi - media sosial adalah jembatan menuju perubahan sosial yang positif. Bantu kami semua untuk bersatu dan bergerak maju menuju dunia di mana media sosial adalah musuh bersama dari perpecahan, bukan alat.

SIMPULAN

Dalam demokrasi digital, media sosial memiliki peran ganda. Selain meningkatkan partisipasi politik dan jangkauan informasi yang lebih luas, media sosial juga secara bersamaan mengintensifkan polarisasi opini melalui ruang gema (*echo chamber*), hoaks yang viral, dan radikalisme digital di era pemilu 2024. Dampak-dampak ini menggambarkan bagaimana media sosial seharusnya tidak hanya dianggap sebagai saluran netral untuk komunikasi politik, tetapi juga sesuatu yang dapat memperkuat atau memperburuk aspek-aspek yang berbeda dari lingkungan demokrasi. Jadi, agar media sosial tetap menjadi alat demokrasi yang sehat dan inklusif, kita membutuhkan pendekatan

holistik untuk menangani area komunikasi kolektif ini. Menanggapi beban ini membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, saluran media sosial, dan masyarakat sipil untuk menyediakan ekosistem digital yang lebih baik, sehingga memungkinkan rekonsiliasi politik setelah pemilu. Selain itu, kebijakan yang lebih ketat mengenai transparansi algoritma dan penyaringan informasi juga perlu diterapkan, jika kita ingin memastikan bahwa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat adalah akurat dan tidak memperuncing perpecahan politik.

Terdapat beberapa rekomendasi untuk bisa menciptakan ruang digital yang lebih sehat dan kondusif pasca Pemilu 2024. Untuk mengurangi iklim politik yang penuh pertikaian dan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap demokrasi, yang pertama-tama kita butuhkan adalah meningkatkan tingkat literasi digital. Ini adalah media sosial, kemampuan untuk mendeteksi hoaks, dan, belakangan ini, bahkan transparansi publik. Kemudian harus ada kebijakan yang meningkatkan transparansi algoritmik dan membatasi penyebaran kebohongan. Tugas pemerintah dan media sosial serta platform media sosial harus menciptakan mekanisme pelaporan

yang tepat dan membebaskan tanggung jawab yang besar atas penyebaran informasi palsu. Selanjutnya, mendorong rekonsiliasi digital dengan meluncurkan kampanye yang didasarkan pada kisah-kisah solidaritas, inklusi, dan kemauan untuk berkomunikasi. Dengan melakukan hal tersebut, diharapkan ruang digital dapat menjadi forum demokrasi yang sehat, sehingga warga negara dapat terlibat dalam perdebatan kritis, tetapi tidak terjebak dalam polarisasi politik yang berlebihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. and Fahlevvi, M. (2023). Cegah penyebaran misinformasi di media sosial menggunakan peralatan dan fitur literasi digital. *renata*, 1(1), 15-20.
<https://doi.org/10.61124/1.renata.2>
- Bakshy, E.M.S., & Adamic, L. A. (2023). *Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook*. *Science*, 348(6239), 1130-1132.
<https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaa1160>
- Berliana, D. and Fitriyah, P. (2022). Retorika digital kebijakan politik "polisi virtual" di *cnnindonesia.com* menggunakan metode discourse network analysis. *Jurnal Broadcasting Communication*, 4(2), 1-13.
<https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i2.238>
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2023). *Network propaganda: Manipulation, disinformation, and radicalization in American politics*. Oxford University Press.
- Cinelli, M., De Francisci Morales, G., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2023). Echo chambers on social media: A comparative analysis. *Nature Communications*, 14(1), 765.
- Dahlgren, P. (2023). *Media and political engagement: Citizens, communication, and democracy in the digital age*. Cambridge University Press.
- Dubois, E., & Blank, G. (2023). The echo chamber is overstated: The moderating effect of political interest and diverse media. *Information, Communication & Society*, 26(5), 729-745.
- Dunan, A. (2020). Government communications in digital era: public relation and democracy. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 71.
<https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108>
- Karpf, D. (2024). *Analysing political participation in the digital age*. Routledge.
- Kartika, I. and Mustika, I. (2023). Peran generasi muda dalam menangkal hoax di media sosial untuk membangun budaya demokrasi indonesia. *JOCER*, 1(2), 29-40.
<https://doi.org/10.60153/jocer.v1i2.26>
- MAFINDO. (2024). Laporan Hoaks Pemilu 2024. *Masyarakat Anti Fitnah Indonesia*
- Norris, P. (2023). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.
- Putri, S. (2023). Media sosial, informasi dan pemilih pemula. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 6(2), 631-637.
<https://doi.org/10.30591/japhb.v6i2.5290>

- Ramadhan, M. (2021). Memaknai urgensi perlindungan dan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas: menyongsong pemilihan umum serentak tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22-37. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255>
- Sunstein, C. R. (2024). *Republic.com 2.0*. Princeton University Press.
- Tucker, Joshua A., Andrew Guess, Pablo Barbera, Cristian Vaccari, Alexandra Siegel, Sergey Sanovich, Denis Stukal, and Brendan Nyhan. "Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature." *SSRN Electronic Journal*, (2018). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2023). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146-1151.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2023). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. *Council of Europe Report*.
- Waruwu, D., Hombing, H., Situmorang, S., & Elsi, S. (2024). Analisis peran teknologi digital pada proses pelaksanaan pemilu serentak 2024. *Journal of Law Administration and Social Science*, 4(5), 776-784. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i5.887>
- Yunas, N., Said, M., & Aziz, A. (2023). Penguatan literasi digital pada generasi millennial dalam menyongsong pemilihan umum 2024. *Surya Abdimas*, 7(4), 715-726. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v7i4.3432>